

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jawa Timur merupakan provinsi terpadat kedua di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2017 adalah sebanyak 260 juta jiwa. Sedangkan penyebaran penduduk terbesar berada di Pulau Jawa dengan persentase 55% jumlah penduduk Indonesia. Dari sebaran di 34 provinsi wilayah Indonesia yang pertama Jawa Barat dengan jumlah penduduk 46,8 juta jiwa, yang kedua yaitu Jawa Timur dengan jumlah penduduk 38,9 juta jiwa. Hal tersebut didapat berdasarkan data sensus oleh Badan Pusat Statistik 2017. Kepadatan tersebut menimbulkan beberapa masalah krusial salah satunya kepadatan transportasi yang terjadi pada wilayah utara Jawa Timur, yaitu pada rute Surabaya-Banyuwangi. Rute ini juga dinilai memiliki nilai keselamatan yang rendah bagi pengendara dikarenakan seringnya terjadi kecelakaan. Untuk memperbaiki keselamatan lalu lintas jalur tersebut dilakukan pembangunan jalan tol Pasuruan-Probolinggo (Pasprob) dan Probolinggo-Banyuwangi (Linggowangi) sehingga jalur tol ini akan menyatu menjadi Surabaya-banyuwangi.

Penggunaannya membayar tol sesuai dengan UU Jalan Tol Nomor 15 Tahun 2005 dan memiliki peran yang sangat signifikan bagi perkembangan suatu daerah, disamping itu jalan tol merupakan jalan raya bebas hambatan fungsi jalan tol sebagai salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan. Jalan tol memiliki peran yang sangat signifikan bagi perkembangan suatu daerah, jalan tol merupakan jalan nasional yang dapat menunjang peningkatan pertumbuhan perekonomian. Pengadaan jalan tol sendiri dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah.

Pembangunan adalah proses yang historial sebuah proses yang bergulir dari waktu ke waktu, tidak pernah berhenti, dan perubahan itu sendiri tidak pernah berganti. Perubahan ke arah perbaikan memerlukan pengarahannya segala budidaya manusia untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan. Dengan sendirinya, pembangunan merupakan proses penalaran dalam rangka menciptakan

kebudayaan dan peradaban manusia. Pembangunan tidak dapat berhenti atau dihentikan karena manusia hidup selalu dipenuhi oleh suasana perubahan struktur fisik atau material, melainkan juga menyangkut perubahan sikap masyarakat. Pembangunan harus mampu membawa umat manusia melampaui pengutamaan aspek-aspek materi dari kehidupannya sehari-hari seperti jalan tol.(Adon Nasrullah, 2013:5)

Saat ini Indonesia sudah mengandalkan jalan tol sebagai jalur transportasi antar daerah. Sayangnya pembangunan jalan tol di Indonesia terbilang lambat dibandingkan negara-negara tetangga. Hal dapat dikaitkan dengan pembebasan tanah diberbagai daerah untuk pembangunan infrastruktur jalan tol aselalu tersendat. Dan salah satu penyebab terjadinya hal tersebut adalah kutrang koperatifnya Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.

Dalam mendukung kepastian dan kejelasan investasi jalan tol, pemerintah menyusun dan menetapkan rencana umum jaringan jalan tol yang menjadi dasar pengembangan jaringan jalan tol dan sebagai acuan bagi para investor dan berinvestasi. Dengan adanya jaringan jalan yang lancar, diharapkan aktivitas ekonomi pun akan menjadi lancar, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa dipacu lebih cepat yang akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini merupakan salah satu nilai penting pembangunan jalan tol. Dan pada akhirnya jalan tol diharapkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Seperti halnya yang terjadi dalam proyek pembangunan jalan tol Surabaya-Banyuwangi yang akan menghubungkan wilayah Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo dan Banyuwangi. (prospek pembangunan jalan tol di indonesia)

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan proyek pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi, Jawa Timur, sudah memasuki tahap tender. "Tahap penyelesaian perencanaan sudah semua, kini sudah mulai tender," katanya setelah menjadi pembicara kunci seminar internasional di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Selasa, 2 Agustus 2016. Basuki memastikan masalah pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol tidak ada kendala berarti karena separuh lahan yang akan

digunakan adalah milik pemerintah. Menurut dia, dari total lahan, sekitar 50 kilometer adalah milik PTPN atau Perhutani. "Itu pasti bisa digunakan terlebih dulu, sisanya akan menyusul kemudian

Basuki mengatakan proyek jalan tol yang dibangun untuk mengatasi kemacetan jalur Pantai Utara bagian timur tersebut ditargetkan rampung pada 2019. Sebab, Agustus 2016 baru memasuki prakualifikasi untuk persiapan lelang. Ia tidak bisa menyebutkan besaran anggaran karena masih dalam perencanaan desain. Jalan tol sepanjang 156 kilometer ini melewati tiga kabupaten, yakni Probolinggo sepanjang 26 kilometer, Situbondo 103 kilometer, dan Banyuwangi 27 kilometer. Pembebasan lahan untuk jalan tol di tiga kabupaten tersebut seluas 1.325 hektare. Dengan rincian, 434 hektare lahan permukiman, sawah 197 hektare, dan perkebunan 694 hektare. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum di Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Banyuwangi, estimasi dana yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan tol ini sebesar Rp 6,7 triliun. Jalan tol Probolinggo-Banyuwangi ini menjadi kelanjutan pembangunan jalan tol Pasuruan-Probolinggo melalui jalur Pantai Utara atau Pantura. (Berita Tempo.Co, Surabaya, unduhan tanggal 19-09-2017).

Penelitian ini saya memfokuskan pada daerah Probolinggo Kecamatan Wonomerto dimana yang menjadi sasaran pembanguna jalan tol Surabaya-Banyuwangi, karena banyak terdapat areal persawahan yang sangat subur dan menjadi mata pencaharian utama masyarakat sekitar. Adanya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol Surabaya-Banyuwangi, membuat resah para pemilik lahan. Sebagai warga negara indonesia yang baik harus mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi, hal ini dinyatakan dengan kerelaan untuk mengorbankan tanah mereka untuk pembangunan tol. Berikut peta lokasi pembangunan jalan tol Surabaya-Banyuwangi:



Gambar.1

peta jaringan jalan tol surabaya-banyuwangi

Dari beberapa pembebasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan cara ganti rugi atau membeli tanah yang terkena jalan tol dimana lahan yang terkena jalan tol kebanyakan sawah masyarakat yang terdapat di beberapa desa terutama Desa Poh Sangit Lor Kecamatan Wonomerto, ganti rugi pembebasan lahan dan bangunan yang terkena jalan tol dikumpulkan di balai Desa Pohsanit Lor, Kecamatan Wonomerto, untuk menerima uang ganti rugi. Demi memperlancar pembayaran ganti rugi dengan sistem cash (uang tunai) dan carry (menjual) terdapat dua pembuktian yaitu surat tanah legal atau formal (sertifikat hak milik) dan sertifikat hak guna.

Proses ganti rugi diawali dengan penyerahan surat hak guna, yang diwakilkan anggota keluarga yang akan menjadi pemegang uang ganti rugi melalui transfer bank (pemegang rekening) kegiatan ini dilakukan di pendopo Desa Pohsangit Lor, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo. Cicilan ganti rugi pun dimulai dan masyarakat sangat antusias untuk menerima dengan harapan dapat memanfaatkan uang untuk kebutuhan hidup seperti membeli tanah untuk membangun rumah dan membeli lahan kembali. Selang beberapa bulan kemudian terjadi beberapa kasus hebat diantara masyarakat dalam pembangunan jalan tol Surabaya-Banyuwangi yaitu konflik antar keluarga sebab ketidakadilan atas pembagian uang dimana keluarga yang bersertatus sebagai pemilik rekening atau atas nama lahan yang terkena jalan tol itu tidak membagi secara rata kepada

saudaranya walaupun tanah tersebut adalah hasil warisan orang tua. Bahkan ada juga yang sampai dibawa ke ranah hukum karena ingin menguasai lahan atau sawah yang terkena jalan tol sehingga memicu datangnya konflik antar keluarga. Adapun lahan yang terkena jalan tol milik saudara Mistar yaitu sepanjang 100 meter dan lebar 15 meter, adapau hasil dari uang ganti rugi dari pengelola jalan tol mendapat uang seberar Rp. 150.000.000 adapun rincian pembagian uang ganti rugi tersebut tidak merata ada yang mendapat 30 juta, 20 juta, dan 10 juta.

Konflik yang terjadi dapat memecahkan hubungan antara keluarga hingga memutuskan hubungan antar keluarga yang telah ada dan tetap berlangsung hingga saat ini sebagai dampak akibat pembanngunan jalan tol Surabaya-Banyuwangi yang saat ini masih dalam tahap pembangunan. Sehingga berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, persoalan ini sangat signifikan untuk dikaji, didiskusikan dan diteliti dari aspek sosiologi sebagai bentuk untuk menemukan benang merah dari persoalan tersebut dan dari uraian singkat diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang *“KONFLIK KELUARGA (Studi Kasus Tentang Konflik Antar Keluarga Dalam Pembagian Uang Ganti Rugi Pembebasan lahan Pembangunan Jalan Tol Di Desa Poh Sangit Lor Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo)”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas, guna memperjelas, lebih spesifik dan memudahkan peneliti dalam melakukan suatu penelitian yang akan diangkat, Maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Apa penyebab konflik antar keluarga dalam pembagian uang ganti rugi pembebasan lahan pembangunan jalan tol ?
2. Apa bentuk konflik antar keluarga dalam pembagian uang ganti rugi pembebasan lahan pembangunan jalan tol ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu,

1. Untuk mengetahui apa penyebab konflik antar keluarga dalam pembagian uang ganti rugi pembebasan lahan pembangunan jalan tol.
2. Untuk mengetahui bentuk konflik antar keluarga dalam pembagian uang ganti rugi pembebasan lahan pembangunan jalan tol ?

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

- Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan teori-teori yang sudah ada sebelumnya dan sudah dipelajari khususnya di program studi sosiologi.
- Hasil penelitian ini di harapkan mampu menambah kajian penelitian mengenai konflik antar keluarga dalam pembagian uang ganti rugi pembebasan lahan pembangunan jalan tol. Sekaligus mampu menjadi acuan untuk penelitian di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- Hasil penelitian ini di harapkan mampu menambah pengetahuan pembaca mengenai konflik antar keluarga dalam pembagian uang ganti rugi pembebasan lahan pembangunan jalan tol.
- Untuk meningkatkan pola pemikiran mahasiswa menjadi lebih kritis dalam menanggapi dan mempelajari tentang persoalan atau masalah sosial terhadap masyarakat.
- Sebagai latihan dan pembiasaan untuk mahasiswa agar berpikir ilmiah.